

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS HASIL PERKEBUNAN DI DESA ERA BARU KECAMATAN TELLULIMPOE

Muh. Amir¹, Jusniaty Jusniaty², Salman Salman³, Ashar Abdillah⁴, Faiz Fakhruddin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: jusniatye@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Era Baru dalam meningkatkan produktivitas hasil perkebunan serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, merupakan wilayah yang memiliki potensi perkebunan yang cukup besar dengan komoditas utama seperti cokelat, cengkeh, karet, dan kelapa. Meskipun terdapat peningkatan harga komoditas dari tahun 2022 hingga 2024, namun peningkatan produktivitas belum sebanding dengan kenaikan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang melibatkan informan kunci seperti aparat pemerintah desa, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam peningkatan hasil perkebunan dengan indikator, (1) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan telah dilakukan dengan pemberian bantuan pupuk dan bibit kepada kelompok tani. (2) Peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan program dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas petani berupa pelatihan Agens Pengendali Hayati dan Pembuatan Pupuk Kompos Bokasi. (3) Peran pemerintah desa sebagai pembina dilakukan dengan membina 29 Kelompok Tani dan 1 Gabungan Kelompok Tani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dan kelompok tani harus berkolaborasi dalam peningkatan hasil perkebunan di desa Era Baru.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the New Era Village Government in increasing the productivity of plantation products and identify the obstacles faced in its implementation. Era Baru Village, Tellulimpoe District, is an area that has considerable plantation potential with main commodities such as chocolate, cloves, rubber, and coconut. Although there has been an increase in commodity prices from 2022 to 2024, the increase in productivity has not been proportional to the increase.

This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data was obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation, involving key informants such as village government officials, farmer groups, agricultural extension workers, and community leaders. This research is located in Era Baru Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency.

The results of this study show that the role of the village government in increasing plantation yields with indicators, (1) The role of the village government as a policy implementer has been carried out by providing fertilizer and seed assistance to farmer groups. (2) The role of the village government as the implementation of the program is carried out by increasing the capacity of farmers in the form of training of Biological Control Agents and the Making of Bokasi Compost. (3) The role of the village government as a supervisor is carried out by fostering 29 Farmer Groups and 1 Farmer Group Association. Thus, it can be concluded that the village government and farmer groups must collaborate in increasing plantation yields in New Era villages.

Keywords: Village Government, Empowerment, Community

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan yang menjadi salah satu penyumbang utama perekonomian nasional (Oktavia et al., 2015). Sektor perkebunan tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai komoditas ekspor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Namun, produktivitas hasil perkebunan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat desa sebagai basis produksi utama (Hidayat, 2024).

Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi perkebunan yang cukup besar namun belum dioptimalkan secara maksimal dengan Luas lahan pertanian/Perkebunan 540 Ha. Dari data yang dihimpun dari Pemerintah Desa Era Baru tentang Jenis komoditi unggulan tanaman perkebunan di antaranya, (a) Lada, (b) Coklat, (c) Cengkeh, (d) Karet, (e) Kelapa. Sedangkan jumlah Kelompok Tani sebanyak 32 kelompok yg tersebar di lima Dusun Desa Era Baru. Hasil produksi tanaman perkebunan dari tahun 2022 - 2024 mengalami peningkatan hasil perkebunan yang signifikan. Perbandingan harga/komoditi tanaman perkebunan dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

No.	Jenis Komoditi	Harga Pertahun (Rp./Kg.)		
		2022	2023	2024
1	Cokelat	Rp. 20.000	Rp. 80.000	Rp. 125.000
2	Cengkeh	Rp. 80.000	Rp. 10.500	Rp. 11.5000
3	Karet	Rp. 7.500	Rp. 9.500	Rp. 10.500
4	Kelapa/Kopra	Rp. 6.500	Rp. 8.000	Rp. 10.000

Sumber Data: Pemerintah Desa Era Baru, 2025

Dengan kenaikan harga komoditi setiap tahun yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas sehingga kondisi ini mencerminkan permasalahan umum yang dihadapi oleh sebagian besar desa di Indonesia, dimana potensi sumber daya alam yang melimpah belum dapat dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kadir, 2015).

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan aspek penting dalam upaya ikut

memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa. Keberhasilan peningkatan produktivitas perkebunan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengidentifikasi potensi lokal, mengembangkan program yang tepat sasaran, dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap teknologi, modal, dan pasar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi desanya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan. Hal ini memberikan peluang besar bagi pemerintah desa untuk lebih aktif dalam meningkatkan produktivitas sektor perkebunan melalui inovasi program dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Peningkatan produktivitas perkebunan tidak hanya terkait dengan aspek teknis budidaya, tetapi juga melibatkan aspek kelembagaan, akses terhadap teknologi, permodalan, dan pemasaran. Teknologi pertanian telah membawa dampak yang signifikan dalam mengembangkan sektor pertanian di Indonesia, termasuk dalam sektor perkebunan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mengoptimalkan peran pemerintah desa.

Rumusan permasalahan yang akan diteliti didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran pemerintah Desa Era Baru dalam meningkatkan produktivitas hasil perkebunan? dan Apa kendala yang dihadapi pemerintah Desa Era Baru dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil perkebunan? Pendekatan pemecahan masalah untuk menjawab permasalahan tersebut, maka teori peran pemerintah desa yang relevan adalah menurut Sahyana (Syaifudin & Ma'ruf, 2022) bahwasanya peran pemerintah desa meliputi 3 variabel (1) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan. (2) Peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan program. (3) Peran pemerintah desa sebagai pembina.

TUNJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional (Alamsyah, 2011). Menurut Sutoro Eko Yunanto (Eko, 2021), fenomena kompleks yang mencakup gagasan, arena, aktor, institusi, proses, dan kekuasaan. Pemerintahan adalah tradisi alamiah ras manusia, ketika manusia bermasyarakat membentuk komunitas, desa, kerajaan atau negara-bangsa. pemerintahan adalah perkara siapa memerintah apa dan siapa, bagaimana serta di mana. Dalam memahami “siapa” sebagai subjek yang memerintah perlu dipahami melalui idealisme dan realisme.

Administrasi pemerintahan desa merupakan keseluruhan proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini menekankan pada pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan desa (Ridlowi et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah desa memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembina kemasyarakatan, dan pemberdaya masyarakat (Indonesia, 2024). Fungsi pemerintah desa dalam konteks pelayanan publik mencakup aspek regulasi, fasilitasi, dan pelayanan langsung kepada masyarakat (Elvira Masengi et al., 2023).

Pemerintah desa berperan sebagai katalisator pembangunan ekonomi lokal melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Peran strategis pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat meliputi identifikasi potensi lokal, fasilitasi akses sumber daya, dan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Raintung et al., 2021).

Kewenangan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2024).

Kewenangan ini memberikan ruang yang luas bagi pemerintah desa untuk mengembangkan inovasi program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Hal ini menjadi landasan penting dalam upaya peningkatan produktivitas sektor perkebunan di desa (Endah, 2020).

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Mubarak, 2010).

Pemberdayaan masyarakat di desa berbasis komunitas harus mempertimbangkan aspek partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Proses pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas individu, tetapi juga penguatan kelembagaan dan jaringan sosial di tingkat komunitas (Ansar Firman, 2021).

Beberapa prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat desa, yaitu: partisipasi aktif masyarakat, kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan yang efektif (Devi Deswimar, 2014).

Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan harus berbasis pada penggalian potensi lokal dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people-centered development) (Margayaningsih, 2016).

Strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan ekonomi, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi, serta pengembangan jaringan pemasaran. Strategi ini relevan dengan upaya peningkatan produktivitas perkebunan di desa (Ndraha & Uang, 2018).

Pentingnya inovasi pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pendekatan ini

memungkinkan optimalisasi potensi perkebunan sebagai basis ekonomi lokal yang berkelanjutan (Sumardjo & Firmansyah, 2015).

3. Konsep Produktivitas Perkebunan

Produktivitas perkebunan dapat didefinisikan sebagai kemampuan menghasilkan output maksimal dari input yang tersedia dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan. Peningkatan produktivitas pertanian, termasuk perkebunan, dapat dicapai melalui penerapan sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan aspek teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia (Siregar, 2023). Produktivitas perkebunan tidak hanya diukur dari aspek kuantitas hasil panen, tetapi juga kualitas produk, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan sistem produksi. Pendekatan holistik ini penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang sektor perkebunan (Saputra, 2024).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas perkebunan, yaitu: kualitas sumber daya manusia, akses terhadap teknologi, ketersediaan input produksi, kondisi agroklimat, dan dukungan kelembagaan. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam menentukan tingkat produktivitas yang dapat dicapai (Apriyani & Marina, 2024). Faktor perubahan iklim juga memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi yang tepat untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas di tengah tantangan perubahan iklim (Hidayati & Suryanto, 2015).

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, antara lain: penerapan teknologi pertanian modern, pengembangan varietas unggul, perbaikan sistem irigasi, penerapan good agricultural practices (GAP), dan penguatan sistem penyuluhan pertanian (Lina Sudarwati & Nasution, 2024). Pentingnya pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos dalam upaya memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan produktivitas perkebunan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan (Zai et al., 2025).

4. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemerintah desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu

diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab (Astuti, 2023). Peran pemerintah juga bisa dikatakan sebagai harapan individu maupun kelompok terhadap seseorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan social. Peran pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pemerintahan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan harus mempunyai sebuah pemikiran yang inovatif dan rasional, sehingga bisa menjalankan sebuah sistem pemerintahan yang bagus. Sebuah sistem pemerintahan yang bagus tentunya tidak terlepas dari adanya SDM yang memadai. Pemerintah desa juga memiliki tugas sebagai pengawas terhadap kebijakan yang dibuat. program-program maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan harus mempunyai sebuah pemikiran yang inovatif dan rasional, sehingga bisa menjalankan sebuah sistem pemerintahan yang bagus. Sebuah sistem pemerintahan yang bagus tentunya tidak terlepas dari adanya SDM yang memadai. Pemerintah desa juga memiliki tugas sebagai pengawas terhadap program-program maupun kebijakan yang dibuat. Menurut Sahyana (Syarifudin & Ma'ruf, 2022) bahwasanya peran pemerintah desa meliputi 3 variabel (1) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan. (2) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program. (3) Peran pemerintah desa sebagai pembina.

Pentingnya peran pemerintah desa dalam koordinasi berbagai program pembangunan, termasuk program peningkatan produktivitas perkebunan. Koordinasi yang efektif memungkinkan sinergi antar program dan optimalisasi penggunaan sumber daya (Sitorus et al., 2023). Dalam analisis manajemen logistik di perkebunan kelapa sawit menunjukkan pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai pihak untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional. Hal ini relevan dengan peran pemerintah desa dalam mengkoordinasikan berbagai stakeholder untuk meningkatkan produktivitas perkebunan (Sitorus et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan penekanan pada pendekatan partisipatif (Simonigar et al., 2023). Penelitian ini akan memanfaatkan berbagai sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dan dianalisis. Teknik pengumpulan data dan analisis data kualitatif yang diperoleh untuk memperdalam pemahaman tentang peran pemerintah desa dalam peningkatan produktivitas hasil perkebunan di Desa Era Baru. Pendekatan ini dipilih agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena peningkatan produktivitas hasil perkebunan di Desa Era Baru. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, observasi lapangan (Alfansyur & Mariyani, 2020). Informan kunci dalam penelitian ini mencakup Pemerintah Desa, Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat, Penyuluh Pertanian di Desa Era Baru. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data historis, kebijakan, dan statistik terkait tingkat produktivitas perkebunan di Desa Era Baru. Observasi lapangan memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung kondisi lingkungan, dan praktik-praktik pengelolaan lahan pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Era Baru terletak di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dengan luas lahan pertanian/perkebunan mencapai 11,23 m². Desa ini memiliki potensi perkebunan yang sangat besar dengan komoditas unggulan berupa lada, coklat, cengkeh, karet, dan kelapa. Terdapat 29 (Dua Puluh Sembilan) kelompok tani yang tersebar di lima dusun, menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam kegiatan pertanian dan perkebunan.

Dari aspek demografis, mayoritas penduduk Desa Era Baru bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Kondisi geografis yang berbukit dengan iklim tropis menjadikan desa ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan, terutama coklat dan cengkeh yang menjadi komoditas unggulan utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Era Baru telah menjalankan perannya dengan cukup efektif dalam meningkatkan produktivitas hasil perkebunan. Hal ini terlihat dari uraian berikut ini dengan indikator (1) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana

kebijakan. (2) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program. (3) Peran pemerintah desa sebagai pembina:

A. Peran Pemerintah Desa sebagai Pelaksana Kebijakan

Pemerintah desa mempunyai peran sebagai pelaksana kebijakan untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan di ambil berdasarkan permasalahan yang ada di desa. Sebagai pelaksana kebijakan tentu saja pemerintah desa mempunyai tanggung jawab atas kebijakan yang sudah ditetapkan dalam menghadapi segala sesuatu permasalahan yang ada di desa (Syaifudin & Ma'ruf, 2022). Pemerintah desa Era Baru mempunyai tugas untuk menentukan kebijakan dan mengambil Keputusan untuk pengembangan dan peningkatan hasil Perkebunan diwilayahnya. Pemerintah dan lembaga terkait bekerjasama dalam menentukan sebuah program yang tepat untuk menjadikan masyarakatnya Sejahtera melalui peningkatan hasil Perkebunan.

Pemerintah Desa Era Baru telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah terkait pengembangan sektor perkebunan. Hal ini tercermin melalui beberapa kegiatan yang telah dilakukan, seperti (1) Pemberian bantuan tanaman kakao, (2) Pemberian bantuan bibit lada, (3) Pemberian bantuan bibit cengkeh, (4) Pemberian bantuan bibit pala (Sumber data: Pemerintah Desa Era Baru 2025). Program tersebut dapat dilaksanakan dengan dukungan wilayah geografis Desa Era Baru, sebagaimana table berikut:

Tabel 1. Banyaknya Tanah Sawah dan Tanah Kering di Desa Era Baru

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	197
2	Tegal	96
3	Perkebunan	796
4	Lahan Bukan Pertanian	34
Jumlah Lahan (Ha)		1.123

(Sumber Data : <https://sinjaikab.bps.go.id/> Tellulimpoe dalam Angka 2024)

Pelaksanaan kegiatan diatas, didukung dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa Era Baru yang mengatakan bahwa “Kami selalu berusaha menjalankan program-program dari pemerintah kabupaten dengan menyesuaikan kondisi lapangan di desa kami. Tidak semua juga program langsung kami diterapkan, tetapi kami memodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat kami”.

B. Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program

Salah satu peran pemerintah desa yang sangat penting dalam pengembangan dan pembangunan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan desa tentu saja akan melahirkan ide-ide yang baru atau inovasi baru dalam berpikir dan bertindak dalam peningkatan hasil perkebunan di Desa Era Baru. Sebagai pelaksana program pemerintah desa melakukan musyawarah dengan Kelompok Tani, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sinjai, dan penyuluh dalam pelaksanaan program peningkatan hasil perkebunan di Desa Era Baru.

Pemerintah desa secara aktif melaksanakan program peningkatan kapasitas petani bekerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan program peningkatan hasil Perkebunan, seperti Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan dan Peserta Kuliah Kerja Karya Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kegiatan tersebut meliputi, (1) Pelatihan perbanyakan dan penyebaran Agens Pengendali Hayati (APH) di Tingka Petani, (2) Demcar pembuatan pupuk kompos bokasi.

Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan telah meningkatkan pengetahuan petani tentang Teknik perbanyakan dan penyebaran APH dan pembuatan pupuk kompos bokasi. Pelaksanaan program ini didukung oleh sarana jalan tani dan irigasi. Pembangunan jalan tani tersebut tentu saja diperuntukkan untuk memudahkan akses jalan ke lahan Perkebunan. Sedangkan Pembangunan irigasi untuk mengairi lahan Perkebunan dan perswahan yang ada diwilayah Desa Era Baru.

C. Peran Pemerintah Desa sebagai Pembina

Peran pemerintah desa dalam membimbing masyarakat diperlukan sebagai modal dasar dalam menciptakan suasana yang harmonis antara pemerintah desa dan

masyarakat. Dengan adanya hubungan yang baik, maka pemerintah desa dapat mengetahui langkah-langka strategik yang akan ditempuh untuk membantu masyarakat dalam peningkatan hasil Perkebunan diwilayahnya. Dampak dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa diharapkan memberikan motivasi dan perubahan kepada semangat kerja masyarakat dalam mengelola hasil perkebunannya.

Untuk wilayah pemerintahan desa Era Baru saat ini Kepala Desa membina sekitar 29 Kelompok Tani dengan 1 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Berikut table daftar Kelompok Tani di Desa Era Baru:

Tabel. 2 Daftar Kelompok Tani Desa Era Baru Tahun 2025

No.	Nama Kelompok Tani	Keterangan
1	Batu Santung Jaya	Aktif
2	Kampung Santung	Aktif
3	Sumber Rezeki	Aktif
4	Tubarania	Aktif
5	Harapan Jaya	Aktif
6	Beringin	Aktif
7	Beringin Setia	Aktif
8	Luraya II	Aktif
9	Cahaya Macconggi	Aktif
10	Batu Tappalang Jaya	Aktif
11	Ajubittie	Aktif
12	Bonto Kunyi I	Aktif
13	Erasa	Aktif
14	Batu Santung	Aktif
15	Bonto-Bonto	Aktif
16	Sipakalebbi	Aktif
17	Sipatuo	Aktif
18	Bonto Kunyi II	Aktif
19	Karaeng Lohe	Aktif

No.	Nama Kelompok Tani	Keterangan
20	Pada Idi	Aktif
21	Mattiro Deceng	Aktif
22	Lurayya I	Aktif
23	Safana	Aktif
24	Mabbulo Sibatang	Aktif
25	Mandiri Jaya	Aktif
26	Passanroang	Aktif
27	Maggunturu	Aktif
28	Sejati	Aktif
29	Mattiriwalie	Aktif

(Sumber Data : Pemerintah Desa Era Baru, 2025)

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Era Baru tentu saja diharapkan dapat memberikan dampak yang positif, Adapun pembinaan yang dilakukan, seperti (1) Pendampingan penyusunan rencana usaha tani berkelompok, (2) Pembinaan administrasi dan manajemen kelompok tani, (3) Memfasilitasi pertemuan antar kelompok tani yang ada di Desa Era Baru untuk melaksanakan berbagi informasi tentang hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok tani. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa menunjukkan peningkatan kinerja kelompok tani sebagaimana terlihat bahwa semua kelompok tani berstatus aktif.

D. Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Era Baru dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil Perkebunan

Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian adalah sebagai berikut:

1. Alokasi dana desa untuk sektor pertanian masih terbatas (hanya 15% dari total APBDesa)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Era Baru mengatakan bahwa Desa Era Baru mengalami tantangan dalam hal pendanaan pembangunan sektor perkebunan. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang tersedia, hanya sekitar 15% yang dialokasikan khusus untuk pengembangan sektor pertanian

dan perkebunan. Rasio dana yang relatif kecil ini menyebabkan terbatasnya program-program pemberdayaan petani, pengadaan sarana produksi, dan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan hasil perkebunan. Sehingga pemerintah desa harus memprioritaskan program-program yang benar-benar strategis dan berdampak langsung terhadap peningkatan hasil produksi lahan pertanian di Desa Era Baru.

2. Ketergantungan pada bantuan pemerintah kabupaten dan provinsi yang tidak selalu ada

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Desa Era Baru ditemukan bahwa petani masih berharap dukungan bantuan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Namun yang menjadi kendala adalah bantuan dari pemerintah tersebut tidak selalu ada dan tidak berkelanjutan. Selain itu, bantuan yang ada dari pemerintah juga tidak menentu nominal ataupun bentuknya jika berupa barang. Terkadang juga bantuan yang ada tidak selalu diperuntukkan untuk kelompok tani yang sama. Sehingga untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk melanjutkan program-program yang telah dimulai belum dapat dipastikan.

3. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian di tingkat desa (hanya 2 orang untuk 5 dusun)

Dengan luas wilayah Desa Era Baru yang terbagi dalam 5 (lima) dusun hanya dilayani oleh 2 orang tenaga penyuluh pertanian. Jumlah ini tidak seimbang dengan kebutuhan pembinaan teknis dengan ketersediaan tenaga ahli yang ada dilapangan. Hal ini mengakibatkan, jumlah pertemuan pendampingan kepada petani menjadi tidak optimal, transfer teknologi pertanian menjadi terhambat, dan program-program inovasi perkebunan yang lain sulit untuk diimplementasikan di seluruh wilayah desa. Kondisi ini berdampak akan lambatnya para petani dalam mengadopsi teknik-teknik budidaya pertanian modern.

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran

Dalam era digital telah berkembang pesat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemasaran hasil perkebunan di Desa Era Baru masih sangat terbatas. Hal ini membuat petani masih mengandalkan sistem pemasaran konvensional yang membatasi jangkauan pasar dan nilai jual hasil pertanian para

petani. Media digital seperti media sosial, marketplace online, atau aplikasi lainnya khusus pertanian belum dimanfaatkan secara optimal untuk mempromosikan dan memasarkan hasil perkebunan petani. Hal ini menyebabkan petani kekurangan peluang dalam mendapatkan informasi harga jual hasil perkebunan yang lebih baik dan akses pasar yang lebih luas.

5. Perubahan pola cuaca yang tidak menentu

Dalam menghadapi fenomena perubahan iklim yang setiap saat mengalami perubahan telah memberikan dampak nyata terhadap kondisi cuaca di Desa Era Baru. Kondisi curah hujan yang tidak dapat diperkirakan datangnya, perubahan musim yang tidak teratur tersebut serta fenomena cuaca ekstrem semakin sering terjadi menyebabkan kesulitan bagi petani dalam merencanakan jadwal tanam, pemeliharaan, dan panen hasil perkebunan. Ketidakpastian cuaca tersebut meningkatkan risiko gagal panen dan menurunnya kualitas hasil perkebunan, sehingga akan memberi dampak terhadap produktivitas hasil perkebunan.

KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Era Baru telah menjalankan perannya secara efektif dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui tiga indikator utama yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Era Baru telah berhasil mengimplementasikan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dengan menyesuaikan kondisi lapangan setempat. Pemerintah desa telah menunjukkan komitmen tinggi dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas petani melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Peran pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Era Baru sangat komprehensif dengan membina 29 Kelompok Tani dan 1 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian, antara lain :

1. Peneliti menyarankan kepada pemerintah desa untuk menggunakan skema pembiayaan alternatif seperti kemitraan dengan perbankan atau koperasi untuk melengkapi keterbatasan dana desa di Desa Era Baru
2. Pemerintah desa bisa juga menerapkan sistem perencanaan anggaran partisipatif yang melibatkan kelompok tani dalam penentuan prioritas program
3. Pemerintah desa bisa mengusulkan penambahan penyuluh untuk lokasi di Desa Era Baru, agar setiap dusun dapat memperoleh pendampingan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. N. (2011). *Memahami Perekmbangan Desa di Indonesia*. 03(02), 647–660.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Ansar Firman, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas. *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 132–146.
- Apriyani, N., & Marina, I. (2024). *The Role of Agricultural Extenders in Farmers ' Group Activities and Their Relationship with Rice Productivity*. 03(01), 10–15.
- Astuti. (2023). Profesionalisme aparat desa dalam jabatan dan tugas administrasi di desa talang kecamatan rejosu kabupaten nganjuk. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) ...*, 35–50.
- Devi Deswimar, A. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 41.
<https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>
- Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20.
<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>
- Elvira Masengi, E., M.C. Lumingkewas, E., & Fransisco Supit, B. (2023). Pengantar Administrasi Publik. In T. Pangalila (Ed.), *CV. Eureka Media Aksara* (1st ed., Vol. 1, Issue 1).

- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Hidayat, B. (2024). Inovasi Teknologi Pertanian untuk Meningkatkan Produktivitas Pangan di Indonesia. *Literacy Notes*, 2(N0. 1), 1–8.
- Hidayati, I. N., & Suryanto, S. (2015). Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Pertanian Dan Strategi Adaptasi Pada Lahan Rawan Kekeringan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.*, 16(1), 42–52. <https://doi.org/10.18196/jesp.16.1.1217>
- Indonesia, P. R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31.
- Kadir, H. (2015). Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas hasanuddin makassar 2012. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*, 1–56.
- Lina Sudarwati, & Nasution, N. F. (2024). Upaya Pemerintah dan Teknologi Pertanian dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Petani di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 3(1), 1–8.
<https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.15847>
- Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, 9(1), 158–190.
- Mubarak, Z. (2010). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. *Tesis*, xv–139.
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku *J-3P (Jurnal Pembangunan ...)*, 137–149.
- Oktavia, Z., Hadi Darwanto, D., & Hartono, S. (2015). Sektor Pertanian Unggulan di Sumatera Selatan. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(2), 61–

69. <https://doi.org/10.18196/agr.129>

- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
- Ridlowi, A., Mufron, A., & Habsari Mutamimah, D. (2024). *Pendampingan dalam Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Masyarakat di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*. 01(01).
- Saputra, R. (2024). *Pengaruh Inovasi Teknologi terhadap Produktivitas Pertanian (Study Literature Review)*. 2(4), 94–102.
- Simonigar, J., Rotty, G. V., & Setijadi, N. N. (2023). Membangun Masyarakat 5.0 di Era Digital Melalui Pendidikan dan Komunikasi Berkelanjutan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 1665–1676.
- Siregar, M. A. R. (2023). Peningkatan Produktivitas Pertanian Melalui Penerapan Sistem Pertanian Terpadu. *Universitas Medan Rea, Indonesia*, 1–10.
- Sitorus, R., Manumono, D., & Ambasari, A. (2023). *Manajemen Logistik di Perkebunan Kelapa Sawit PT Surya Agrolika Reksa di Desa Beringin Jaya , Kecamatan Singingi Hilir , .* 1(September), 1783–1796.
- Sumardjo, ., & Firmansyah, A. (2015). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Pangan di Sekitar Wilayah Operasional PT. Pertamina Asset 3 Subang Field. *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 8.
<https://doi.org/10.29244/agrokreatif.1.1.8-19>
- Syaifudin, M. Y., & Ma’ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>
- Zai, W., Ziliwu, Y. M., Waruwu, P., Agroteknologi, P. S., & Nias, U. (2025). *Peran Agroteknologi dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian*. 1.

